

PUBLICIO JURNAL ILMIAH POLITIK, KEBIJAKAN DAN SOSIAL

E-ISSN : 2656-0305

DOI : <https://doi.org/10.51747/sfq6wy89>

RESPONSIVITAS BPBD DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Mohd Zein Alfarizi Dwi Putra ¹, Lies Nur Intan², Bastiar Tumbuh³,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tamansiswa Palembang ¹⁻³
korespondensi: liesnurintan@gmail.com

ABSTRAK

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk menganalisis responsivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ogan Komering Ilir dalam menanggulangi bencana di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Masalah difokuskan pada kecepatan respons, koordinasi lintas sektor, kesiapsiagaan sumber daya, serta kualitas layanan darurat kepada masyarakat terdampak. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori responsivitas birokrasi dan manajemen bencana yang menekankan ketepatan waktu, adaptivitas, dan kolaborasi dalam situasi krisis. Data-data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kajian ini menyimpulkan bahwa BPBD Ogan Komering Ilir menunjukkan respons yang relatif cepat pada tahap tanggap darurat, namun masih menghadapi kendala pada aspek koordinasi teknis, keterbatasan logistik, dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan. Penguatan kapasitas kelembagaan, integrasi sistem peringatan dini, dan peningkatan kolaborasi antarinstansi diperlukan untuk meningkatkan responsivitas dan efektivitas penanggulangan bencana secara berkelanjutan.

Kata Kunci: responsivitas; BPBD; manajemen bencana; koordinasi; pelayanan publik.

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) merupakan salah satu wilayah di Sumatera Selatan yang memiliki tingkat kerawanan bencana sangat tinggi, khususnya bencana hidrometeorologi seperti banjir musiman serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Karakteristik geografis Kabupaten OKI yang didominasi oleh bentang alam gambut luas dan lintasan Daerah Aliran Sungai (DAS) memperbesar risiko terjadinya krisis lingkungan yang masif. Dalam situasi ancaman bencana yang berulang ini, responsivitas birokrasi penanggulangan bencana menjadi instrumen kritis untuk meminimalkan kerugian material, kerusakan ekologis, hingga jatuhnya korban jiwa.

Secara teoritis, responsivitas merupakan salah satu indikator utama dari kualitas kinerja pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana ditegaskan oleh

?, responsivitas mengukur daya tanggap organisasi birokrasi terhadap kebutuhan, aspirasi, serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam konteks pelayanan publik darurat, ? menyoroti bahwa birokrasi tidak sekadar bertindak sebagai regulator, melainkan harus hadir melayani masyarakat secara cepat, adaptif, dan inklusif.

Ketika dihubungkan dengan manajemen krisis, responsivitas mencakup serangkaian kapasitas kelembagaan dalam fase pra-bencana, tanggap darurat, hingga pascabencana (??). Menurut ?, dinamika bencana modern menuntut organisasi pengelola risiko untuk memiliki kecepatan respons yang tinggi dan kelenturan struktur agar dapat beradaptasi dengan situasi darurat yang kompleks dan dinamis.

Di Indonesia, landasan hukum tata kelola penanggulangan bencana telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menegaskan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terpadu, terencana, dan terkoordinasi. Kerangka kebijakan ini diturunkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan sub-urusan bencana sebagai bagian dari pelayanan dasar masyarakat. Untuk melaksanakan mandat tersebut di tingkat lokal, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibentuk sebagai entitas garis depan dalam manajemen bencana daerah.

Meskipun kerangka normatif dan kelembagaan telah terbangun, berbagai studi empiris menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan bencana di daerah masih menghadapi kendala krusial. ? serta ? menemukan bahwa desentralisasi tata kelola bencana sering kali terkendala oleh terbatasnya kapasitas kelembagaan lokal dan koordinasi antarinstansi. Sejalan dengan hal tersebut, ? dan ? menggarisbawahi bahwa efektivitas manajemen krisis daerah sangat bergantung pada efisiensi alokasi sumber daya serta koordinasi lintas sektor. Di sisi lain, ? dan ? menekankan pentingnya pendekatan tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) dalam tanggap darurat, di mana integrasi antara BPBD, institusi keamanan (TNI/Polri), dinas teknis, serta entitas non-pemerintah menjadi kunci keberhasilan operasi penanggulangan bencana.

Kendati demikian, kajian spesifik mengenai responsivitas BPBD dalam konteks wilayah dengan karakteristik ekologis khusus seperti kawasan gambut di Kabupaten OKI masih terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada evaluasi kebijakan umum (?) atau mitigasi berbasis partisipasi masyarakat semata (??). Penelitian oleh ? dan ? memang menyentuh aspek kapasitas BPBD, namun belum membedah secara mendalam bagaimana indikator responsivitas birokrasi—seperti kecepatan respons, integrasi sistem informasi kebencanaan (?), dan kualitas layanan publik darurat—bekerja secara bersinergi di tingkat operasional.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam responsivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam menanggulangi bencana, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan keilmuan administrasi publik dan manajemen bencana, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan kapasitas kelembagaan BPBD OKI dalam mewujudkan penanggulangan bencana yang inklusif, berkelanjutan, dan adaptif.

2. METODE

2.1. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis (?). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengeksplorasi secara mendalam dan holistik mengenai fenomena kompleks responsivitas birokrasi, dinamika koordinasi lintas sektor, serta kendala operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dalam konteks penanggulangan bencana (?).

Desain deskriptif-analitis memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menggambarkan realitas empiris di lapangan secara detail, tetapi juga menganalisis dan mengaitkan temuan tersebut dengan kerangka teoritis responsivitas birokrasi (?), *collaborative governance* (?), serta manajemen bencana internasional (??).

2.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara disengaja (*purposive location*) dengan pertimbangan bahwa Kabupaten OKI memiliki karakteristik kerawanan bencana hidrometeorologi yang sangat tinggi, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau dan banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) pada musim hujan. Pusat pengumpulan data difokuskan di Kantor BPBD Kabupaten OKI, instansi-instansi teknis terkait, serta beberapa kecamatan terdampak bencana (seperti Kecamatan Tulung Selapan, Pedamaran, dan Kayuagung). Penelitian lapangan dilaksanakan secara intensif selama enam bulan, terhitung mulai dari bulan Januari hingga Juni 2024.

2.3. Penentuan Informan (Sumber Data)

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* yang dikombinasikan dengan teknik *snowball sampling* untuk menjangkau pemangku kepentingan kunci (*key informants*) yang memiliki pengetahuan langsung, wewenang, dan keterlibatan praktis dalam proses penanggulangan bencana di Kabupaten OKI.

Informan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga kategori utama:

1. Aparatur Pemerintah dan Birokrasi Publik:

- Kepala Pelaksana dan Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat BPBD Kabupaten OKI (2 orang).
- Staf operasional dan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD OKI (3 orang).
- Perwakilan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten OKI (3 orang).
- Aparat Pemerintah Kecamatan dan Desa di wilayah rawan bencana (4 orang).

2. Unsur Keamanan dan Mitra Kolaboratif: item Perwakilan Kodim 0402/OKI-OI dan Polres OKI yang terlibat dalam satuan tugas karhutla dan banjir (2 orang) (?).

3. Anggota relawan Manggala Agni dan Masyarakat Peduli Api (MPA) (3 orang).

4. Masyarakat Terdampak:

- Tokoh masyarakat dan warga yang terdampak langsung oleh bencana banjir dan karhutla di Kabupaten OKI (5 orang).

Total informan kunci yang diwawancarai secara mendalam berjumlah 22 orang, di mana proses penambahan informan dihentikan setelah data mencapai tingkat kejenuhan (*data saturation*).

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjamin keabsahan dan kedalaman data, pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik triangulasi utama (?):

1. **Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*):** Wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interview guide*). Fokus wawancara mencakup empat indikator utama responsivitas BPBD: (a) kecepatan respons tanggap darurat, (b) koordinasi dan jaringan kolaboratif antar-instansi, (c) kesiapsiagaan sumber daya serta pemanfaatan teknologi informasi kebencanaan, dan (d) kualitas serta akuntabilitas pelayanan bagi masyarakat terdampak.
2. **Observasi Lapangan (*Field Observation*):** Peneliti melakukan observasi partisipatif pasif terhadap aktivitas posko komando BPBD OKI, mekanisme alur komunikasi darurat, proses pendistribusian logistik, serta pelaksanaan koordinasi di lapangan saat terjadi krisis. Peneliti mencatat dinamika interaksi serta hambatan teknis yang muncul di lapangan.
3. **Studi Dokumentasi (*Document Study*):** Pengumpulan dokumen-dokumen resmi dan sekunder yang relevan, meliputi:
 - Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) BPBD Kabupaten OKI.
 - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan laporan bulanan kejadian bencana BPBD OKI.
 - Dokumen regulasi terkait, seperti UU No. 24/2007, UU No. 23/2014, PP No. 21/2008, serta Peraturan Daerah Kabupaten OKI mengenai kelembagaan BPBD.
 - Berita cetak dan media elektronik lokal terkait penanganan krisis di Kabupaten OKI.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan mengikuti tahapan analisis model interaktif dari ?, yang mencakup empat langkah utama yang berlangsung secara sirkuler dan saling mendukung:

Pengumpulan Data → Reduksi Data → Penyajian Data → Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

1. **Pengumpulan Data (*Data Collection*):** Mengumpulkan seluruh transkrip wawancara, catatan lapangan hasil observasi, dan dokumen sekunder.

2. **Reduksi Data (*Data Reduction*):** Proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data kasar dari lapangan. Data diklasifikasikan ke dalam coding-coding tematik sesuai indikator responsivitas birokrasi (?) dan *collaborative governance* (?).
3. **Penyajian Data (*Data Display*):** Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang terstruktur, tabel komparasi, serta matriks hubungan antar-variabel untuk memudahkan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti.
4. **Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*):** Peneliti menarik kesimpulan secara bertahap mulai dari kesimpulan sementara hingga kesimpulan akhir yang sah. Verifikasi dilakukan secara kontinu dengan mengecek kembali keabsahan data terhadap transkrip dan catatan lapangan.

2.6. Uji Keabsahan Data (*Data Trustworthiness*)

Untuk meyakinkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian kualitatif, digunakan kriteria keabsahan data menurut ?:

- **Triangulasi Sumber dan Metode:** Membandingkan hasil wawancara antar-informan (misalnya antara pihak BPBD, aparat keamanan TNI/Polri, dan warga) serta mencocokkan hasil wawancara dengan dokumen resmi dan hasil observasi lapangan.
- **Member Checking:** Mengonfirmasi ulang temuan atau transkrip wawancara kunci kepada informan utama untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti tidak menyimpang dari maksud informan.
- **Audit Trail:** Menyusun rekaman jejak pemeriksaan penelitian secara sistematis, mulai dari pengumpulan data mentah, proses coding, hingga penarikan kesimpulan akhir.

3. TINJAUAN LITERATUR

3.1. Kerangka Teoritis Responsivitas dan Manajemen Kebencanaan

Responsivitas birokrasi merupakan salah satu indikator kunci efektivitas organisasi publik dalam merespons kebutuhan dan situasi darurat masyarakat (??). Dalam arena penanggulangan bencana, responsivitas tidak sekadar diukur dari kecepatan reaksi saat tanggap darurat, melainkan dari keseluruhan kapasitas sistem yang mencakup pencegahan, kesiapsiagaan, hingga pemulihan pascabencana (?). ? menegaskan bahwa keberhasilan manajemen darurat modern bergantung pada struktur organisasi yang tangkas, kesiapan logistik, serta kejelasan standar operasional prosedur di tingkat operasional.

Dalam situasi krisis yang kompleks, organisasi tunggal seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak dapat bekerja secara terisolasi. Oleh karena itu, ? mengemukakan teori *collaborative governance* (tata kelola kolaboratif), yang mendefinisikan tata kelola bersama sebagai mekanisme di mana lembaga-lembaga publik dan non-publik terlibat secara langsung dalam pembuatan keputusan berbasis konsensus dan eksekusi kolektif. Model kolaboratif ini menjadi landasan strategis untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam penanggulangan bencana daerah (??).

3.2. Dimensi Keamanan Non-Tradisional dan Hubungan Sipil-Militer

Manajemen krisis dan bencana di wilayah pesisir serta lahan basah/gambut juga berkaitan erat dengan dinamika keamanan non-tradisional dan keamanan maritim. ? menjelaskan bahwa konsep keamanan maritim mencakup perlindungan terhadap ancaman non-militer, seperti bencana alam hidrometeorologi, degradasi lingkungan pesisir, serta krisis kemanusiaan di wilayah perairan dan aliran sungai. Dalam konteks pertahanan dan keamanan wilayah, ? menekankan pentingnya penguasaan kekuasaan maritim (*seapower*) dan keterlibatan armada pendukung untuk menjalankan operasi militer selain perang (*military operations other than war/MOOTW*), termasuk bantuan bencana dan penyelamatan darurat.

Di samping itu, efektivitas penanggulangan bencana di daerah memerlukan pola interaksi yang harmonis antara aparat keamanan dan lembaga birokrasi sipil. ? dalam kajiannya mengenai hubungan sipil-militer (*civil-military relations*) menggarisbawahi bahwa integrasi peran militer (seperti TNI) dalam misi-misi penanggulangan bencana sipil harus diatur melalui kerangka tata kelola yang transparan dan akuntabel. Pendekatan ini tidak hanya mengandalkan instrumen kekuasaan keras (*hard power*), tetapi juga memerlukan pemanfaatan *soft power*—sebagaimana dikonseptualisasikan oleh ?—berupa pembentukan jaringan kepercayaan (*trust*), komunikasi publik yang persuasif, serta diplomasi kemanusiaan untuk membangun legitimasi dan koordinasi yang efektif di lapangan.

3.3. Sintesis Kebijakan dan Penelitian Terdahulu

Pengintegrasian kerangka teoritis di atas sejalan dengan regulasi penanggulangan bencana di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008. Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan lokal (?), utilitas teknologi informasi kebencanaan (?), serta pelibatan modal sosial masyarakat (??) menjadi variabel penentu responsivitas birokrasi daerah (??). Penelitian ini menempatkan responsivitas BPBD Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam kerangka kolaboratif tersebut guna menganalisis ketepatan, kecepatan, dan keberlanjutan tindakan penanggulangan bencana di tingkat daerah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis hasil penelitian mengenai responsivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) diuraikan berdasarkan empat indikator utama, yaitu: (1) kecepatan respons dalam tahap tanggap darurat, (2) koordinasi lintas sektor dan tata kelola kolaboratif, (3) kesiapsiagaan sumber daya dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan, serta (4) kualitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat.

4.1. Kecepatan Respons dalam Tahap Tanggap Darurat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten OKI memiliki tingkat responsivitas yang tinggi pada fase awal terjadinya bencana, khususnya dalam pembentukan posko darurat dan mobilisasi Tim Reaksi Cepat (TRC). Aktivasi posko komando dilakukan dalam rentang waktu kurun 1 hingga 3 jam setelah laporan diterima dari pihak kecamatan atau desa. Pembentukan posko darurat yang sigap ini merupakan bentuk pemenuhan terhadap amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008.

Dalam perspektif teori administrasi publik, kecepatan tindakan ini mencerminkan dimensi responsivitas birokrasi, yakni kemampuan organisasi dalam mengenali kebutuhan mendesak publik dan memenuhinya tanpa penundaan yang tidak perlu (??). Penanganan tanggap darurat yang cepat amat penting untuk menekan potensi korban jiwa serta meminimalkan dampak krisis (??).

Tabel 1: Karakteristik Respons Operasional BPBD Kabupaten OKI per Jenis Bencana

Jenis Bencana	Waktu Tanggap Awal	Tantangan Utama di Lapangan
Kebakaran Hutan & Lahan (Karhutla)	1–2 jam setelah titik <i>hotspot</i> terdeteksi	Akses lokasi gambut yang terpencil, keterbatasan sumber air, dan angin kencang.
Banjir Luapan Sungai (DAS)	2–4 jam setelah laporan debit air naik	Luasnya cakupan wilayah tergenang dan keterbatasan unit perahu karet evakuasi.

Namun demikian, penelitian menemukan ketimpangan kecepatan respons antara wilayah perkotaan (seperti Kecamatan Kayuagung) dengan wilayah perairan dan gambut terpencil (seperti Kecamatan Tulung Selapan dan Cengal). Karakteristik geografis OKI yang didominasi oleh perairan sungai dan rawa gambut menuntut sarana transportasi khusus. Keterbatasan armada transportasi air dan kondisi infrastruktur jalan darat yang rusak kerap memperlambat distribusi logistik bantuan ke wilayah perbatasan. Kondisi ini memperkuat argumen ? bahwa kesiapsiagaan operasional dan keterhubungan jaringan transportasi merupakan prasyarat mutlak bagi efektivitas mobilisasi tanggap darurat.

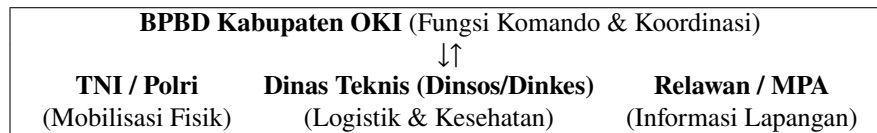
4.2. Koordinasi Lintas Sektor dan Tata Kelola Kolaboratif

Penanggulangan bencana di Kabupaten OKI—terutama krisis karhutla tahunan—membutuhkan integrasi lintas instansi. BPBD OKI berperan sebagai koordinator dalam Satuan Tugas (Satgas) Kebencanaan yang melibatkan Kodim 0402/OKI-OI, Polres OKI, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemadam Kebakaran, serta kelompok masyarakat.

Pola interaksi ini mencerminkan penerapan *collaborative governance* (?), di mana lembaga pemerintah dan non-pemerintah duduk bersama dalam membagi peran operasional. Dalam kaitan ini, peran unsur TNI dan Polri amat dominan dalam membantu evakuasi dan pemadaman karhutla. Hal ini sejalan dengan kerangka hubungan sipil-militer (*civil–military relations*) yang dikemukakan oleh ?, di mana pelibatan aparat militer dalam operasi selain perang (*military operations other than war*) terbukti memperkuat kapasitas operasional birokrasi sipil.

Selain itu, pendekatan *soft power* (?) diterapkan melalui komunikasi persuasif dan pendekatan sosial kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dalam perspektif keamanan non-tradisional dan keamanan maritim, penanganan banjir di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) OKI memerlukan pengelolaan sumber daya perairan dan evakuasi berbasis wilayah perairan, sesuai dengan prinsip-prinsip penanganan krisis wilayah perairan (??).

Meski kolaborasi pada fase tanggap darurat berjalan relatif solid, penelitian mencatat adanya kelemahan koordinasi pada fase pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Setelah fase darurat selesai, sinergi antar-dinas teknis cenderung menurun akibat tingginya ego sektoral dan tidak sinkronnya verifikasi data kerusakan infrastruktur maupun pemukiman. Hambatan struktural birokrasi ini sejalan dengan



Gambar 1: Struktur Hubungan Kolaboratif Penanggulangan Bencana di Kabupaten OKI

temuan ? dan ?, yang menyatakan bahwa kohesi organisasi publik sering kali melemah saat krisis mereda.

4.3. Kesiapsiagaan Sumber Daya dan Sistem Informasi Kebencanaan

Kapasitas kesiapsiagaan BPBD Kabupaten OKI dipengaruhi secara langsung oleh ketersediaan alokasi anggaran, kuantitas personel, dan kualitas sarana-prasarana (?). Berdasarkan data lapangan, jumlah personel tetap BPBD OKI masih belum seimbang jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten OKI yang mencapai lebih dari 18.000 km². Ketersediaan peralatan khusus seperti pompa air bertekanan tinggi untuk lahan gambut dalam dan armada perahu karet evakuasi banjir masih terbatas.

Di sisi lain, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi kebencanaan belum terintegrasi secara digital dan real-time. Pelaporan kejadian bencana dari tingkat desa masih dominan menggunakan media komunikasi manual seperti aplikasi pesan instan dan telepon. Belum adanya platform basis data terpadu berbasis sistem informasi geografis (SIG) menyebabkan proses verifikasi data korban dan dampak kerusakan memakan waktu lama. Padahal, ? dan ? menggarisbawahi bahwa efektivitas dan akselerasi respons birokrasi di era modern sangat ditentukan oleh transformasi digital dan modernisasi sistem informasi peringatan dini (*early warning system*).

4.4. Kualitas Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat

Kualitas pelayanan publik dalam situasi krisis diukur dari sejauh mana bantuan darurat (logistik, tenda pengungsian, dan posko kesehatan) didistribusikan secara adil dan tepat sasaran (?). Secara umum, masyarakat terdampak menilai bantuan yang diberikan BPBD OKI memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar awal. Namun, keluhan timbul terkait keterlambatan penyaluran bantuan lanjutan di pemukiman terisolir.

Di tingkat tapak, modal sosial (*social capital*) masyarakat OKI tergolong tinggi. Pembentukan kelompok Manggala Agni dan Masyarakat Peduli Api (MPA) di desa-desa rawan karhutla menjadi bukti tingginya partisipasi swadaya warga. Sebagaimana dijelaskan oleh ? serta ?, modal sosial dan keterlibatan komunitas lokal merupakan pilar utama dalam membangun daya tahan masyarakat (*community resilience*). Pelatihan bencana berbasis komunitas yang konsisten dapat meningkatkan daya tanggap masyarakat sebelum bantuan formal birokrasi tiba di lokasi (??).

Berdasarkan keseluruhan analisis, responsivitas BPBD OKI tergolong ****cukup baik**** pada fase tanggap darurat, namun masih memerlukan pembenahan mendasar pada aspek integrasi teknologi informasi, kesinambungan koordinasi pascabencana, serta pertimbangan alokasi sumber daya di wilayah pelosok.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal utama mengenai responsivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI):

1. **Kecepatan Respons Tanggap Darurat:** BPBD OKI menunjukkan tingkat responsivitas yang tinggi dalam melakukan aktivasi posko komando dan pemetaan awal bencana (1–3 jam setelah laporan diterima). Namun, kecepatan distribusi bantuan logistik ke daerah perairan dan gambut terpencil masih terkendala oleh keterbatasan sarana transportasi khusus dan hambatan aksesibilitas geografis.
2. **Tata Kelola Kolaboratif:** Sinergi penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat telah berjalan baik melalui pendekatan *collaborative governance* yang melibatkan unsur TNI (Kodim 0402/OKI-OI), Polri, dinas teknis, serta relawan masyarakat. Namun, koordinasi lintas sektor ini cenderung mengendur pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana akibat kendala integrasi data antarinstansi.
3. **Kesiapsiagaan dan Modernisasi Sistem:** Kesiapsiagaan operasional BPBD OKI masih terkendala oleh terbatasnya jumlah personel dan sarana pendukung pemadaman lahan/evakuasi banjir. Selain itu, belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi kebencanaan berbasis digital secara *real-time* menjadi faktor penghambat akurasi dan efisiensi pelaporan bencana.
4. **Kualitas Layanan dan Modal Sosial:** Pelayanan darurat kepada masyarakat secara umum dinilai memadai, di mana keberadaan modal sosial berupa partisipasi aktif Masyarakat Peduli Api (MPA) dan relawan lokal menjadi penyokong utama daya tahan komunitas di lapangan.

5.1. Saran dan Rekomendasi Kebijakan

Untuk meningkatkan responsivitas dan efektivitas penanggulangan bencana secara berkelanjutan, rekomendasi yang diajukan adalah sebagai berikut:

- **Penguatan Infrastruktur Digital:** Mengembangkan aplikasi platform Sistem Informasi Kebencanaan Daerah berbasis SIG untuk mempercepat pelaporan, pemetaan titik rawan, dan verifikasi data kerusakan secara *real-time*.
- **Peningkatan Kapasitas Logistik dan Sarana:** Memprioritaskan alokasi anggaran APBD untuk pengadaan moda transportasi air khusus dan peralatan pemadaman gambut di wilayah rawan tinggi (Kecamatan Tulung Selapan, Cengal, Pedamaran).
- **Institusionalisasi Kolaborasi Pascabencana:** Menyusun SOP koordinasi lintas sektor formal yang mengikat hingga fase rehabilitasi dan rekonstruksi guna memastikan keberlanjutan pemulihan fisik dan ekonomi warga.
- **Pemberdayaan Berbasis Komunitas:** Meningkatkan frekuensi pelatihan dan alokasi insentif operasional bagi relawan Masyarakat Peduli Api (MPA) guna memperkuat ketahanan lokal pra-bencana.

6. KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian maupun publikasi artikel ini.

Pustaka